



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive*

Srta 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

AGUS RIADI

NIM: 11675102134

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGUS RIADI
 NIM : 11675102134
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA
 PEKANBARU PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

DISETUJUI OLEH

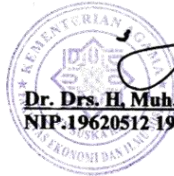
PEMBIMBING

Abdiana Ilosa, S.Ap, MPA
NIP : 19870716 201503 2003

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP.19620512 198303 1 003

DR.Kamaruddin,S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Agus Riadi
 Nim : 11675102134
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota
 Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus
 Tanggal Ujian : 10 Agustus 2020

Disetujui oleh,

Ketua Penguji

Dr. Hj. Siti Rahmah, M. Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Penguji II

Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASTER PERLINDUGAN KHUSUS

Oleh :

Agus Riadi
NIM. 11675102134

Penelitian ini di laksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memenuhi hak-hak anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program kota layak anak di Kota Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di Kota Pekanbaru pada klaster perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini melihat pada klaster perlindungan khusus dengan indikator a) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan b) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang di selesaikan dengan pendekatan restoratif c) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak d) Persentase anak yang di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat di simpulkan bahwa Implementasi Program Kota Layak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus belum berjalan secara optimal atau terlaksana dengan baik. Hal ini di lihat dari kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus masih meningkat dalam setiap tahunnya. Selain itu juga masih mengalami hambatan-hambatan seperti kurangnya sumberdaya manusia, kondisi di lapangan dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Implementantion of the Child-Worthy City Program in Pekanbaru City on the Special Protection Clusters.

This Study was done at the women's Safety and Child Protection Service of Pekanbaru Ciy and The Social Services in Pekanbaru City

By :

AGUS RIADI

The Child Worthy City is a Regency/City Development System that integrates Commitments and resources goverments, citizens, and business world planned throughly and continrally in policies, programs and activities to fulfill children's rights. As for the purpose of the study are :

- 1. To find out how the implementations of the child-worthy city program in pekanbaru city of the special protection cluster is*
- 2. To identifiis against factors of the implementations of the child-worthy city program in Pekanbaru City of the special protection cluster.*

The research was minister of women's empowerment and child protection rules No.12 2011 about the child-worthy city indicator. The study looked a special protection by indicators : a) the percentase of children requiring special protection that receive service b) The percentase od the children's cases were faced with the law completed with restonative c)Aproach of a disastering mechanism that looked at the childre's in terest/necessity, d) The percentase of childrens were exampled form the worst job forms of childres.

The kind of research used in this study is qualitative with a descriptive approach. Based on interviews, documentations and field observations, it can included that the implementation of a viable city program in Pekanbaru City of special protection cluster, it optimally or well done. Hasn't run this is looked at form the case of children who need special protection. It is still increasing every year and getting obstacles such as the lack of human resources, conditions is field and back of adeguate facilities.

KeyWords : Implementations, Child-worthycities, Special protection.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alam, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Masirah dan Ayahanda Alm. Saifuddin, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh mad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku penasehat akademis
6. Ibuk Abdiana Ilosa, S.Ap. MPA sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersdia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjdai tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Untuk keluarga besar bapak, Alm bapak Saifuddin. terima kasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan, dan doa yang membuat peneliti terus semangat dan terus tersenyum dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk abang Muhammad Azhar sekeluarga terimakasih atas segala bantuannya Dukungan serta motifasi baik do'a, moril maupun materil sehingga adinda mampu menyelesaikan peroses perkuliahan dari awal sampai ahir dengan baik
10. Untuk kakak Firawati sekeluarga untuk kakak Siti Masruroh sekluarga untuk kakak Khairunisak sekluarga untuk kakak Siti Su'aidah sekluarga terimakasih atas motifasi, dukungan, doa serta bantuan baik secara moril atau materil sehingga adinda mampu menyelesaikan perkulihan dengan biak.
11. Untuk Keluarga Besar Administrasi D 2016 di Pekanbaru terimakasih yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) Periode 2018/2019 dan Periode 2019/20. Terimakasih telah banyak memberi plajaran dan motivasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada Keluarga Besar KKN Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

15. Untuk teman-teman Hafiz Kemurata An Nawai, Nofran Whayuda Putra, Restu Adi Pratama, Bobby Frzia Aziz, Wahyudi Jamal, Luis V Tobing dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan motivasi serta menjadi tempat diskusi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis,

AGUS RIADI
NIM. 11675102134

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Publik	10
2.1.1. Kategori Kebijakan Publik.....	13
2.1.2. Tahap Pembuatan Kebijakan	16
2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.2.1. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.3. Kota Layak Anak	22
2.4. Anak di Mata Hukum	25
2.5. Pandangan Islam	27
2.6. Penelitian Terdahulu.....	30
2.7. Definisi Konsep	32
2.8. Konsep Operasional.....	34
2.9. Kerangka Berfikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.2. Jenis Penelitian	36
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5. Informan Penelitian.....	39
3.6. Analisis Data.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	43
4.2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	48
4.3. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi	48
4.4. Dinas Sosial Kota Pekanbaru	85
4.5. Visi dan Misi Dinas Kota Pekanbaru	86
4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru ..	87
4.7. Struktur Organisasi	88

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1. Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus	103
5.1.1. Persentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Diperoleh Layanan	105
5.1.2. Persentase Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Di Selesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	113
5.1.3. Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana yang memperhatikan kepentingan anak	115
5.1.4. Persentase Anak Yang Di Bebaskan Dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	120
5.2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus	124

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	128
6.2. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

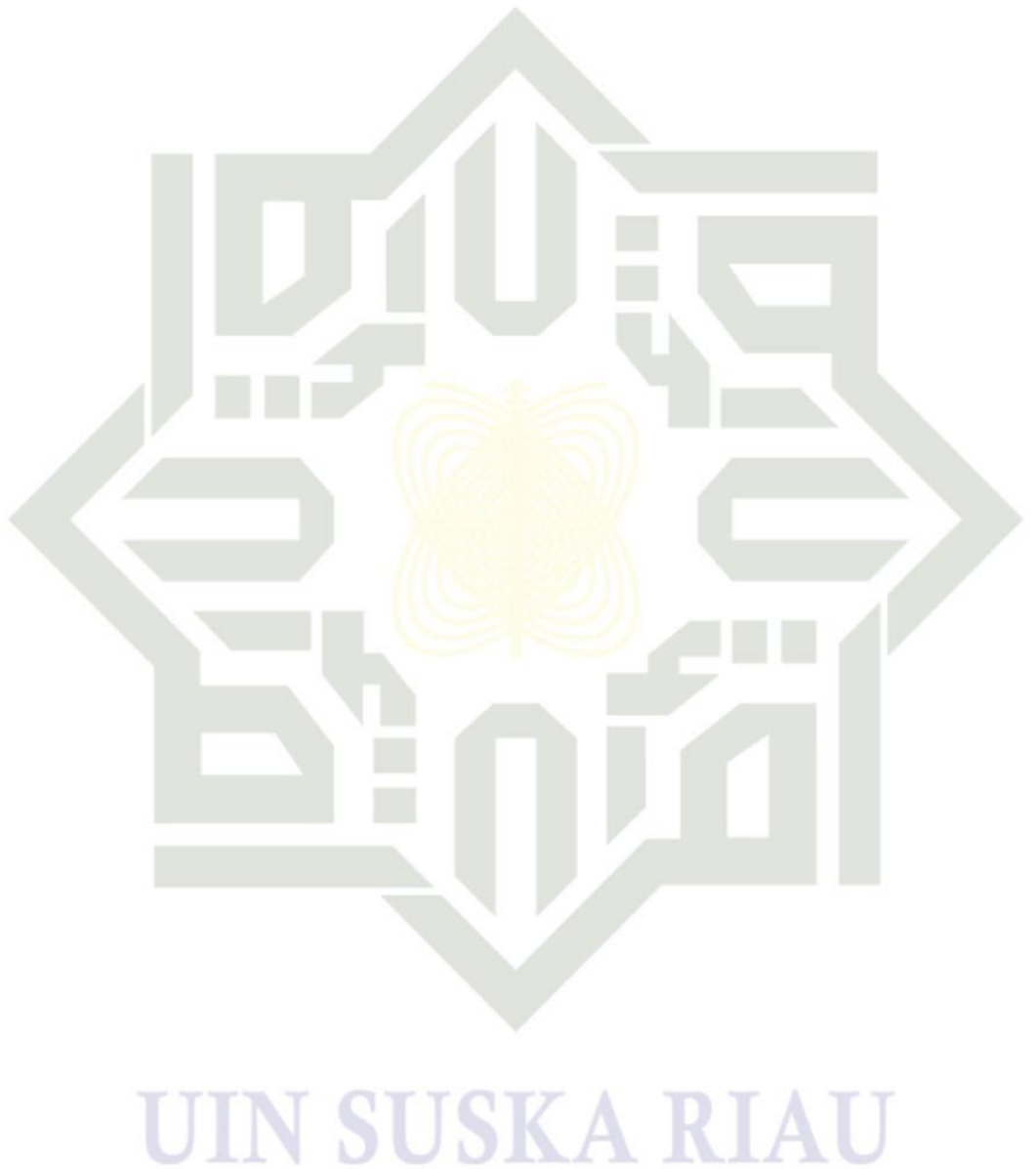
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Klaster Kota Layak Anak	4
Tabel 1.2	Data Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019	6
Tabel II.	1Penelitian Terdahulu	30
Tabel II.2	Konsep Operasional	34
Tabel. III.1	Key Informen	39
Table V.1	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan.....	107
Table V.2	Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum.....	115
Table V.3	Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum.....	113
Table V.4	Jumlah anak yang di tertibkan.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Type B) . 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak ternilai bagi setiap orang tua. Kehadiran seorang buah hati merupakan hal yang paling dinanti bagi sebuah keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan buah hati akan menjadi pusat perhatian orang tua. Anak merupakan aset terbesar bagi orang tua, anak juga merupakan potensi yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi Indonesia yang akan menjadi generasi pembangunan nasional sehingga akan menjadikan penentu keberlangsungan serta keutuhan sebuah negara Indonesia.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak, secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud

dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

c) Sedangkan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi ke pentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Maka dalam menyangkut batasan umur anak itu sendiri penulis menarik kesimpulan bahwa batasan untuk seseorang yang di katakan dalam golongan anak-anak adalah seseorang yang masi berusia 18 tahun dan belom menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melindungi anak yang terlibat dengan hukum pemerintah sudah melakukan inovasi berupa Kota Layak Anak (KLA). Yang bertujuan untuk memberikan dan memperoleh hak-hak anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. sehingga dapat di nilai oleh anak melalui lingkungan sekitar. Secara jelas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dalam hal untuk melindungi hak-hak kesejahteraan pada anak, pemerintah membuat suatu program kebijakan tentang upaya Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Semua bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

Pada program Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 klaster yaitu,

Tabel 1.1
Klaster Kota Layak Anak

KLASTER I	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II	LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
KLASTER III	KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
KLASTER IV	PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, & KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V	PERLINDUNGAN KHUSUS

Sumber : *Bahan Advokasi Kebijakan KLA*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang merujuk pada Konvensi hak anak yang di kelompokkan dalam lima klaster. Dari lima klaster tersebut penulis memfokuskan pada klaster kelima tentang Perlindungan Khusus

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU no 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu *Anak*

yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menyandang predikat kota layak anak di wilayah Provinsi Riau sejak tahun 2015, yang mana penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta, setelah dilakukannya penilaian secara intensif di tahun 2014. Pada tahun 2018 Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan Kembali penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan pembinaan forum anak daerah terbaik, dan pada tahun 2019 Kota Pekanbaru juga kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria nindya dan 2 penghargaan lainnya yaitu penghargaan puskesmas ramah anak dan penghargaan sekolah ramah anak

Maka berangkat dari di sandangnya peredikat penghargaan KLA yang proleh Kota Pekanbaru meningkat dari tahun 2015-2017 mendapatkan peringkat *pratama*, pada tahun 2018 naik lagi menjadi *madya*, dan mendapatkan penghargaan Forum Anak terbaik, lalu tahun 2019 menyandang 3 perdikat penghargaan sekaligus yaitu naik peringkat menjadi *nindya*, mendapatkan *penghargaan sekolah ramah anak, dan penghargaan Puskesmas Ramah anak.* namun dalam data lain juga menyebutkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019

NO	Jenis kasus	Th 2017	Th 2018	Th 2019
1	Kekerasan terhadap anak	3	5	12
2	Penelantaran	9	1	2
3	Hak anak	2	17	26
4	Hak asuh ank	14	5	2
5	Aanak berhadapn hukum	4	4	19
6	Kenakalan anak	5	1	1
7	Trafficking	0	0	0
8	Pencabulan	19	32	36
9	Pencabulan (saksi)	0	0	1
10	KDRT	3	5	4
	TOTAL	59	70	103

Sumber: Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan unit layanan perlindungan perempuan dan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang di sajikan dalam tabel di atas dapat di lihat jumlah anak di Kota pekanbaru yang berhadapn dengan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terus meningkat jumlahnya. Sehingga hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian pada kelaster perlindungan khusus dalam sebuah judul.

Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemuakan di atas maka dapat di rumuskan suatu rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus?
2. Faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada kelaster perlindungan khusus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada kelaster perlindungan khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus

3. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, rivew, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik bisa di artikan sebagai suatu ketetapan yang di pilih untuk di ambil. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39).

Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar, sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang atau masyarakat (Budi Winamo, 2012:21).

Sedangkan dalam pandangan (Wayne Parsons, 2006:3) publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.

Secara definisi, menurut (Woll dalam Hessel, 2003:2) kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. *Pertama*, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. *Kedua*,

adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan *ketiga*, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.

Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2003:54) mengatakan bahwa hal-hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan atau di biarkan untuk itu, kebijakan publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namu bisa juga berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namum di sepakati

Secara sederhana dapat di katakan oleh Nugroho dalam bukunya *Public Polcy* (2011:96) bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang di buat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah setrategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang di cita-citakan

Dalam pendapat Robert Eyestone sebagai mana di kutip Leo Agustin (2008:6) mendefenisiskan kebijakan publik sebagai “Hubungan anar unit pemerintah dengan lingkunganya” banyak pihak yang beranggapan bahwa defenisi tersebut masi terlalu luas untuk di pahami, karena kebijakan publik dapat mencakup banyak hal,.Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan public yaitu :

- a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Aderson yang di kutip Young dan Quin yang di tulis oleh Edi Suhartono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (2012:44) menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “ *a puposive course of action followed by an actors in dealing with a problem or metter of concern*” Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci termuat dalam kebijakan publik (lihat Young dan Quinn 2002:5-6)

Kebijakan publik adalah yang di buat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masarakat.

3. Seperangkat kebijakan yang beroreantasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. kebijakan publik bisa juga di rumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial dapat di pecahkan oleh kerangkaka kebijakan yang sudah ada dan karena tidak memerlukan tindakan tertrntu.

Kebijakn publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah di rumuskan, keputusan yang telah di rumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat oleh badan pemerintah atupun beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat

2.1.1. Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli: James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) me-nyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan di lakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaima-na kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kebijakan materal dan kebijakan simbolik Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran.

Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (policy demands)

Tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Keputusan kebijakan (policy decisions)

Keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pernyataan kebijakan (policy statements)

Sebuah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya: ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Keluaran kebijakan (policy outputs)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5. Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan. Ada beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. Dunn, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Tidak semua masalah akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak semua isu menjadi agenda pemerintah. Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan tersebut. Pendapat lain juga dikatakan oleh Woll yang dikutip oleh Hessel, bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan banyak orang.

William N. Dunn menawarkan 4 fase proses *problem structuring* untuk merumuskan masalah, yaitu *problem search* (pencarian masalah), *problem definition* (pendefinisian masalah), *problem specification* (spesifikasi masalah) dan *problem setting* (pengenalan masalah).

Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para pejabat yang dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda kebijakan. Pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam merumuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur *forecasting* (peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa mendatang.

3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Bagi Patton dan Sawicki, Implementasi berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. Para eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seperti

yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Suatu tindakan pemerintah baru dikatakan sebagai suatu kebijakan apabila tindakan tersebut di laksanakan, bukan hanya suatu keinginan, suatu keinginan yang belum di laksanakan oleh pemerintah belum dapat di anggap sebagai kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebutlah yang di sebut implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan umumnya lebih sulit dari merumuskan, tidak semua kebijakan berhasil di implementasikan. Berikut beberapa definisi implementasi kebijakan publik:

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, sebagaimana yang dikutip (Budi Winarno, 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output*, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. Tahap implementasi berhubungan dengan apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan program pemerintah.

Kemudian Ripley dan Frenkin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa “ Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan otoritas program., kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)” keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau di lihat dari peroses dan pencapaian hasil ahir (*output*) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagian aktor, khususnya para birokrat yang di maksud untuk membuat program berjalan. Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para imlementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program)

- b. Adanya kelancarannya pelaksanaan rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah
- Bahwa keberhasilan implementasi di tandai dengan rutinitas dan fungsi dan tidak adanya maslah-masalah yang di hadapi

- c. Pelaksanaan dan dampak yang di kehendaki terarah

Bahwa keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yaang di kehendaki dari semua program-program yang di kehendaki

Ketiga persepektif tersebut di gunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk di identifikasi. Teori Ripley dan Frenkin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat

kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi, pada akhirnya setelah semua berjalan akan terwujud kinerja yang baik dan akan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Public Policy* (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Kemudian menurut Yulianto Kadji dalam bukunya *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (2016:45) Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik.

2.2.1 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang ada. Ketika kebijakan sudah dibuat maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Maka berikut ini beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan para pakar dan pemerhati kebijakan publik:

Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) model ini menegaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik

Model Elmore, Lipsky, Hjem dan O’Porter

Modal ini adalah yang di tawarkan oleh Richard Elmore (1979) Michel Lipsky (1971) dan Benny Hjern dan David O’porter (1981) menegaskan bahwa “modal ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki.

Pada dasarnya model implementasi ini di dasarnya pada tahapan-tahapan yakni,

- a) Mengidentifikasi jaringan yang terlibat.
- b) Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implemntasi kebijakanya atau masi melibatkan pejabat pemerintah di level bawah.
- c) Kebijakan yang di buat sesuai harapan, keinginan publik yang menjadi target.
- d) Parkarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga suadaya masyarakat.

Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menggambarkan proses implementasi kebijakan secara detail. Model ini relatif relevan di terapkan dalam semua kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kota layak anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 telah memperkenalkan istilah ini melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. sehingga dapat di nilai oleh anak melalui lingkungan sekitar. Secara jelas kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan indikator kota layak anak yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di sebutkan tentang 31 indikator Kabupaten layak anak yang mana kabupaten/kota dapat di katagorikan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KLA apa bila sudah memenuhi hak-hak anak yang di ukur dengan indikator KLA yaitu:

1. Penguatan lembaga
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapat masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya
 - d. Tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan program dan kegiatan
 - e. Tersedia data anak terpilih berdasarakan jenis kelamin, umur dan kecamatan
 - f. Keterlibatan lembaga masrakatan dalam dalam pemenuhan hak anak
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

Klaster hak anak

1. Hak sipil dan kebebasan
 - a. Persentase anak yang terregistrasi dan mendapatkan kutipan akata klahiran
 - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak
 - c. Jumlah klompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten, kcamatan dan desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lingkungan keluarga dan pengusahan alternatif
 - a. Persentase usia perkawinan pertama di atas 18 (delapan belas tahun)
 - b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
 - c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak
3. Kesehatan dasar dan kesejahtraan
 - a. Angka kematian bayi
 - b. Prevelensi kekurangan gizi pada balita
 - c. Persentasi air susu ibu
 - d. Jumlah pojok asi
 - e. Persentase imunisasi dasar lengkap
 - f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi mental
 - g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahtraan
 - h. Perentase rumah tangga dengan akses air bersih
 - i. Tersedia kawasan tanpa rokok
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 - b. Persentasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
 - c. Persentase sekolah ramah anak
 - d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan abak ke dan dari sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat di akses semua anak.

5. Perlindungan khusus

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh layanan
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- d. Persentase anak yang di bebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

2.4 Anak Di Mata Hukum

Di dalam ilmu hukum di kenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban di bagi menjadi dua, yaitu manusia atau badan hukum., termasuk anak adalah subjek badan hukum, walaupun masi terdapat pengecualian dalam hal tertentu, tetapi peraturan perundang-undangan yang sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapatkan perlindungan.

Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah anugrah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban

yang di bebaskan oleh hukum, demikian pula dalam dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Upaya perlindungan anak perlu di lakukan sejak dini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak beumur 18 (delapan belas tahun) bertolak dari konsepsi perlindungan anak secara utuh, menyeluruh dan komperhensif, undang-undang ini mewajibkan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Soerjono Soekento menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahir menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia juga berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasrkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibanya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, Pelanggaran hukum terjadi jika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya di jalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi.

2.5 Pandangan Islam

Anak adalah anugrah terindah sekaligus amanah yang di titipkan oleh Allah swt. Di berikan pada orang tua. Kehadiran buah hati sangat di nanti-nanti

Oleh orang tua sebagai penyempurna kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Bahkan tidak jarang pasangan yang belum dikaruniai anak rela melakukan berbagai usaha demi mendapatkan anak. Sebuah keluarga yang rumahnya tidak diisi oleh anak-anak akan terasa sepi dan tidak berwarna.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya, anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan anak itu perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya dan keutamaan anak soleh.

a) Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46).

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasakurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrataa'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hatibu orang tuanya.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c) Keutamaan Anak Shalih

Hanya anak satu-satunya yang ketika dia beramal maka kita sebagai orang tua juga mendapat pahalanya, anak shalat, puasa, haji, dan melakukan segala kebaikan, ketika kita meninggal kelak tetap mengalir pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Moh. Rohmat Said, Murtano dan Sri Utaminingsih (2017)	Implementasi Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak (Jurnal)	Hasil penelitian ini melihat indikator implementasi KLA dalam pendidikan dua dari delapan sudah tepat yaitu kawasan tanpa rokok yang sudah di berlakukan di tempat umum dan sekolah ramah anak sedangkan yang belum optimal dari 6 indikator tersebut meliputi: keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak fasilitas informasi pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, sarana perjalan anak dari dan ke sekolah serta fasilitas kreasi dan rekreasi. Implementasi KLA di sekolah 5 dari tujuh belum optimal yaitu: keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, fasilitas informasi, kawasan tanpa rokok, wajib belajar 12 tahun, dan sarana prjalanan anak dari dan ke sekolah hanya sekolah ramah anak yang sudah	Hasil penelitian yang peneliti lakukan iyalah melihat pemenuhan indikator implementasi KLA melihat pada anak yang berhadapan pada hukum baik penanganan dan hak anak

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			tepat dan sarana kreasi dan rekreasi	
	Sri Rahmayuni (2014)	Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014 (Jurnal)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program/kegiatan pengembangan KLA di kota pekanbaru suda mulai terlaksana, akan tetapi belum maksimal karena masi ada program/kegiatan yang belum terlaksana terdapat kendala yang mempengaruhi strategi pemrintah kota pekanbaru dalam pengembangan kota layak anak yang pertama, kurangnya sosialisasi kepada masrakat kedua, minimnya anggaran dari pemerintah kota dan yang ketiga kurangnya partisipasi masyarakat akibat mindset/pola pikir masyarakat	Penelitian yang peneliti lakukan melihat dan menjelaskan pengembangan perogram kota layak anak di kota pekanbaru terlaksana dengan baik namun pada kelaster perlindungan khusus yang belum terlaksana dengan sempurna terbukti belum mendapatkan penghargaan seperti kelasterlainya dan masi tingginya angka anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Muwarnai Binti Yahya (2019)	Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Jurnal)	Penelitian ini menjelaskan implementasi dan penerapan kebijakan kota layak anak di kota pekanbaru sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah sudah memenuhi sudah memenuhi beberapa indikator sesuai dengan kelaster kota layak anak yang	Penelitian yang penulis lakukan menlihat implementasi dan penerapan kebijakan perogram kota layak anak di kota pekanbaru pada kelaster perlindungan khusus yang masi memerlukan pemebenahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		telah di tentukan hal ini terbukti dari terpenuhinya hak hak anak berdasarkan konfensi hak anak namun ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak adalah, kurangnya komunikasi komitmen komunikasi dan pengetahuan dari organisasi perangkat daerah yang lainya mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan kota layak anak	dalam indikator kota layak anak pada klaster perlindungan khusus
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

2.7 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implemtasi Kebijakan Publik

Ripley dan Frenkin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa “Imlementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program., kebijakan, keuntungan, (*benfit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)” keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat di ukur atau di lihat dari peroses dan pencapaian hasil ahir (*outp ut*) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih.

3. Kota Layak Anak

Kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untukm menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

4. Anak Di Mata Hukum

Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah anugrah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjng tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum,. Demikian pula dalam dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkrmbangan secara optimal dan terarah.

2.3 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah paham dalam pemahaman teori yang digunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan di oprasikan dalam penelitian ini.

Tabel II.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak	I. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan	a. Jumlah anak yang memerlukan perlindungan b. Tersedianya layanan yang mengintegrasikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus c. Bentuk program pencegahan dan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	II. Persentase kasus anak berhadapn dengan hukum yang di selesaikan dengan pendekatan restorative	a. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum b. Adanya peroses penyelesaian kasus dengan penerapan diversi
	II. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	a. Tersedianya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak b. Implementasi penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
	V. Persentase anak yang di bebeaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	a. Jumlah anak yang di tarik dari pekerjaan terburuk anak b. Program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak c. Adanya program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Sumber: Permen Permen PPPA No 12 Tahun 2011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

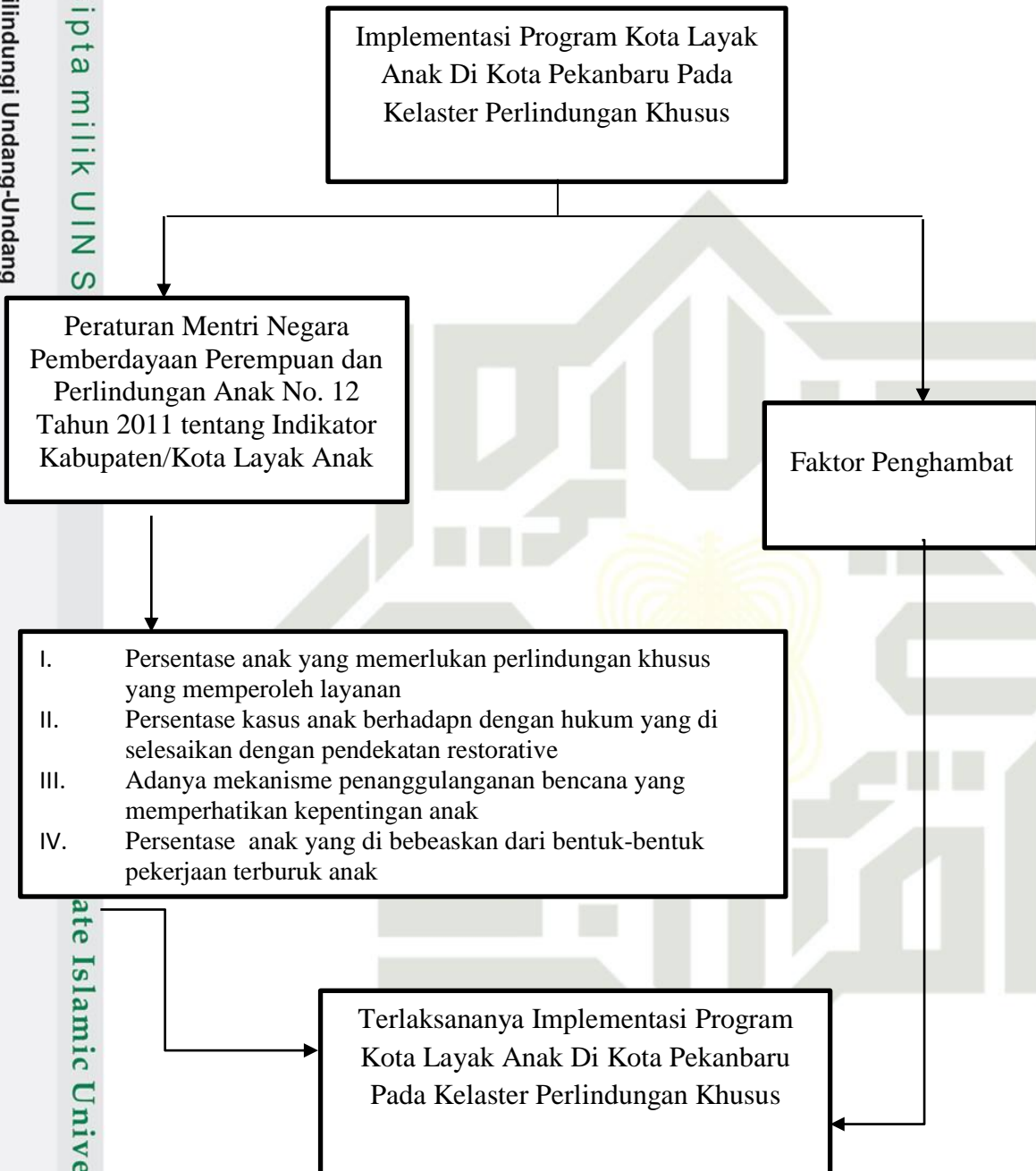
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Kota Pekanbaru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas sosial kota pekanbaru. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah instansi yang bertugas meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kota Pekanbaru.

3.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain. Pendekatan deskriptif demenurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya sebuah penelitian harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian tersebut bersifat objektif, ilmiah dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dalam mendeskripsikan tentang implementasi program kota layak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan untuk mendekatkan penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam lingkungan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee* (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Pelaksanaan Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari kembali informasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data. Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada pada lembaga yang mengembangkan Program Kota Layak Anak. Disamping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan informasi melalui internet.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling yaitu peneliti menentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key Informen* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informen dalam penelitian ini adalah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Pekanbaru dan Dinas sosial kota Pekanbaru.

Tabel. 3.1
Key Informen

NO	INFORMAN	JUMLAH
	Kasi perlindungan khusus terhadap anak	1
	Kordinator unit layanan	1
	Kasi rehsos dan perlindungan anak	1
	Jumlah	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*)

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses pengajuan data. Data yang disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar dan gelap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dengan proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Pengujian keabsahan data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti yang kemukakan oleh Moeloeng (2005:237) :

a. Ketekukan Pengamatan

Peneliti dituntut untuk lebih rinci dan konsisten untuk mendapatkan informasi baru sampai mencapai kejenuhan. Ketekukan pengamatan akan melahirkan proses pendalaman pemahaman dalam mengamati objek penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi dapat menguji kejujuran, kemampuan merekam data yang diperoleh di lapangan. Triangulasi juga bisa digunakan berdasarkan sumber data yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai pendapat, situasi dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Peneliti perlu melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dari berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat melalui diskusi bertujuan untuk mengetahui masalah dari proses penelitian dan kebenaran hasil sehingga dapat diketahui kekeliruan-kekeliruan dan memberi referensi bagi peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdur Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekita lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Buluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”

2. Misi Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan / keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industry, parawisata serta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

1. Luas dan Letak Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

2. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lainnya sebagai Ibukota Provinsi ialah sebagai berikut:

- a. Pekanbaru-Taluk Kuantan berjarak 118 km
- b. Pekanbaru-Rengat berjarak 159 km
- c. Pekanbaru-Tembilahan berjarak 213,5 km
- d. Pekanbaru-kerinci berjarak 33,5 km
- e. Pekanbaru-Siak berjarak 74,5 km
- f. Pekanbaru-Bangkinang berjarak 51 Km
- g. Pekanbaru- Pasir Pangaraian berjarak 132,5 Km
- h. Pekanbaru-Bengkalis berjarak 128 km
- i. Pekanbaru- Bagan Siapiapi berjarak 192,5 km
- j. Pekanbaru-Dumai berjarak 125 km

4. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

5. Iklim

Suhu dan Kelembapan di suatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut dengan permukaan laut dan jarak dari pantai. Suhu udara Kota Pekanbaru termasuk Kota beriklim tropis dengan suhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

udara maksimum berkisar 20.2 ° celcius hingga 23.3 ° celcius. Curah hujan antara 38.6-435.0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b) Musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- c) Kelembapan maksimum antara 96%-100%, dan kelembapan minimum antara 46%-62%.

4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

4.2.1 Visi

“Kesetaraan Dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City Yang Madani”

4.2.2 Misi

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Mewujudkan tatakelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

4.3 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;
- b) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- e) Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) Penerimaan dan pelaksanaan tindak lanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- i) Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Pengelolaan keuangan dinas;
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum;
- c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- j) Perumusan dan pengkoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya;
- f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender

Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender.

Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- n) Penyiapan kelembagaan Bidang Pengarusutamaan Gender;
- o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- q) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Ekonomi
Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Fungsi

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Kualitas Keluarga
Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

Fungsi

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- n) Perumusan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- o) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial, Politik Dan Hukum

Tugas

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

Fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- i) Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- n) Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- o) Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak.

Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- t) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- u) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- w) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- x) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- y) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- dd) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ee) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Tugas

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan perlindungan khusus terhadap anak.

Fungsi

Seksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Pencegahan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Tugas

Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Fungsi

Seksi Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- c) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e) Perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f) Perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepala Seksi Informasi Dan Data

Tugas

Seksi Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan sub urusan informasi dan data.

Fungsi

Seksi Informasi dan Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- h) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- i) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- o) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- j) Perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n) Pelaksanaan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif Dan Pendidikan

Tugas

Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan.

Fungsi

Seksi Pemenuhan Hak Anak Di Bidang Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e) Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- i) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- k) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- l) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- o) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- p) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

4.4. Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial adalah bidang pemerintahan yang mengurus masalah - masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang latar belakang dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekarang diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Pada saat ini, kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja no. 6, Tangkerang Selatan, Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau 28128.

4.5. Visi dan Misi Dinas Kota Pekanbaru

4.5.1. Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan Sosial dan peran masyarakat”.

4.2.2 Misi Dinas Kota Sosial Pekanbaru

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengeloalan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan atau desa.

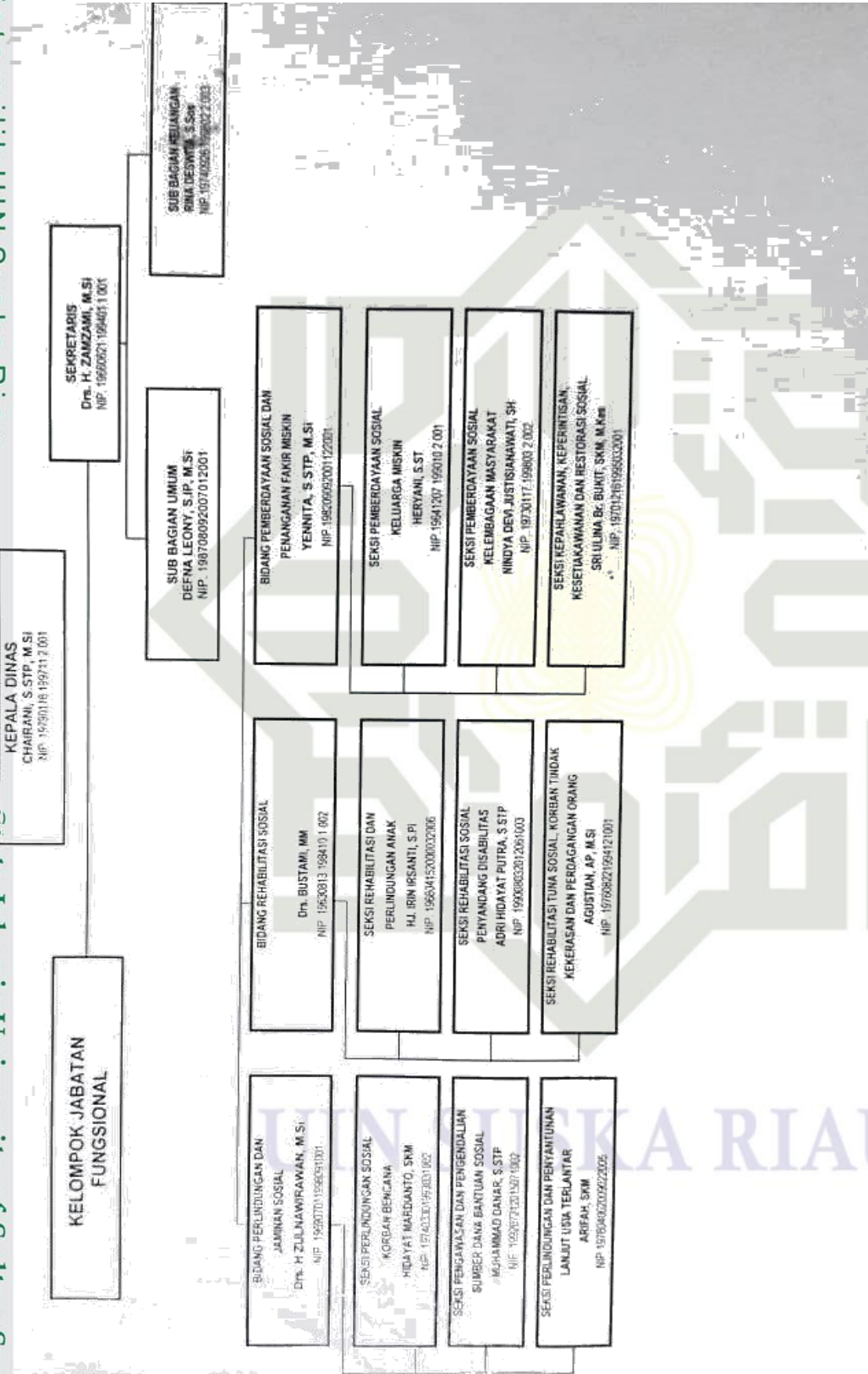
47. **Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari berbagai bagian – bagian seperti dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Type B)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas – Tugas Pokok dari Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang social
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
- e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

- a. Memimpin,menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
 - h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, ketertiban dan keamanan kantor.
 - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - j. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
 - l. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional**
 - a. Melaksanakan kegiatan teknis bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kunjungan rumah;
 - c. Melaksanakan seleksi dan diagnose sosial;
 - d. Memberikan advokasi penerima manfaat yang bermasalah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyampaikan usulan rujukan pelayanan penerima manfaat kepada kepala UPT;
- f. Melaksanakan pemahaman kasus;
- g. Melaksanakan pembinaan lanjut;
- h. Melaksanakan studi kasus
- i. Melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerja sosial dalam pant;
- j. Melaksanakan sidang kasus dalam tahapan pelayanan pekerjaan sosial;
- k. Melakukan rujukan;
- l. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus.

4. Sub Bagian Umum

- a. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian umum/tata usaha dan perlengkapan.
- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- f. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
- g. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- h. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas
- i. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas
- j. Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi unit kerja dilingkungan dinas.
- k. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materi bagi unit kerja dilingkungan dinas
- l. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai, serta pengamanan dilingkungan kantor
- n. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK dan registrasi ANS dilingkungan dinas

- o. Merumuskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKPANS
- p. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai

5. Sub Bagian Keuangan

- a. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang dinas
- b. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan
- c. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana prasarana dinas
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan
- e. Merumuskan dan melaksanakan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- f. Merumuskan Renstra, renja dan program pembangunan tiap tahunnya dilingkungan dinas
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bagian keuangan
- h. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi, pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melakukan verifikasi serta mneneliti kelengkapan permintaan pembayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyiapkan surat perintah membayar
- k. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- l. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- m. Melaksanakan akuntansi dinas
- n. Menyiapkan laporan keuangan dinas
- o. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas
- p. Merencanakan program kerja pengeluaran operasional rumah tangga dinas
- q. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas
- r. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- a. perlindungan sosial korban akibat bencana alam;
- b. Pemberian santunan akibat bencana alam;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- d. Mitigasi penanganan korban bencana alam;
- e. Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam;
- f. Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. Pengelolaan logistik korban bencana alam; dan
- h. Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial

- a. Menyiapkan bahan pengkajian program kerja Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Bantuan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi dan pelayanan kegiatan bimbingan teknis usaha-usaha kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan untuk Orsos/LKS.

9. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar

- a. Menyusun rencana kerja tahunan pada Seksi Penyantunan dan Penyaluran sesuai data dan ketentuan atau petunjuk untuk pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan membuat disposisi agar bawahan memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Memberikan petunjuk kerja dan menjelaskan arah kebijakan pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk menghindari kesalahan dalam hal penyelesaian pekerjaan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan serta mengetahui hambatan yang timbul;
- e. Memeriksa dan meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya untuk bahan pembuatan SKP;
- f. Menyiapkan bahan konsep pelaksanaan penerimaan dan penyaluran kelayakan sesuai dengan ketentuan untuk bahan penentuan kebijakan pimpinan;
- g. Menyiapkan bahan konsep petunjuk teknis penyantunan dan penyaluran berdasarkan data dan ketentuan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menyediakan bahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyantuan dan penyaluran.
- i. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta mencari alternative berdasarkan data dan petunjuk untuk bahan penentuan kebijakan atasan;
- j. Membuat laporan secara berkala tentang hasil kerja sesuai dengan data dan ketentuan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Rehabilitas Sosial

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi social
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar atau anak nakal, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya
- d. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasil - hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
- f. Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Rehabilitas Dan Perlindungan Anak

- a. Rehabilitasi anak Korban tindak kekerasan;
- b. Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Penanganan permasalahan sosial anak pasca razia;
- d. Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin;
- e. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak

12. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- a. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan;
- b. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia;
- d. Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas;
- e. Pemberdayaan kaum Disabilitas; dan
- f. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas

13. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

- a. Rehabilitasi Tuna Sosial;
- b. Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial;
- c. Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar pasca razia;
- e. Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar;
- f. Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban Perdagangan Orang; dan
- g. Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

14. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas meliputi perencanaan kegiatan
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis, membina
- c. menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- e. Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

16. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat

- a. Pelaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat / pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi

Sosial

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Implementasi Perogram Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus dapat di katakan dalam katagori belum optimal atau belum berjalan dengan baik karena hal-hal berikut:

- a. Implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus di katakan belum berjalan dengan baik hal itu bisa di lihat dari jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya. Kemudian belum terlaksananya secara baik perogram pencegahan dan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu juga dalam sosialisai penanggulangan bencana hanya fokus kepada anak-anak yang tidak melibtkan orang tua dan tokoh masyarakat dalam memberikan penanggulangan bencana yang mementingkan anak. Dalam hal lain jumlah anak yang berada di jalanan belum mampu di tertibkan secara keseluruhan karena masih terlihat anak-anak yang berada dalam pekerjaan terburuk anak. Selain itu juga tersedianya sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga peross pembinaan tidak terlaksana dengan baik karena mengalami kekurangan alat guna menjadikan upaya penghapusan bentuk-bentuk ekerjaan terburuk anak. Pembinaan yang di lakukan cuman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfokuskan kepada anak-anak harusnya pembinaan di berikan juga untuk orang tua anak tersebut.

- b. Implementasi program kota layak anak di kota pekanbaru pada klaster perlindungan khusus juga masih mengalami beberapa hambatan di antaranya minimnya anggaran seringkali menjadi hambatan, kemudian jumlah anggota yang selalu bisa turun kelapangan kapan saja selain itu di karenakan kondisi di lapangan itu sendiri, karena anak-anak yang sebelumnya pernah di tertibkan kembali lagi kejalanan dengan melakukan kegiatan yang sama seperti seblumnya. Anak yang berada di lapangan seperti berada dalam satu dan kesatuan sampai saat ini belum diketahui kebenarannya, hambatan lain juga seperti alat pembinaan yang di gunakan tidak memadai untuk di gunakan dalam pembinaan dan tidak adanya ruangan khusus yang bisa di gunakan untuk konsultasi bagi paksos di dinas sosial kota pekanbaru.

Saran

Adapun saran dari penulis untuk menjadi masukan untuk pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru mampu melakukan penerapan pencegahan dan penanganan untuk anak yang memerlukan perlindungan dengan cara kerja sama dari lingkungan kecil yang di terapkan secara merata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan dinas sosial kota pekanbaru mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana yang mementingkan kepentingan anak..
- c. Diharapkan kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru serta dinas sosial kota pekanbaru mampu menambah sumber daya manusia yang berkualitas yang yang mampu memperbaiki implementasi program kota layak anak pada perlindungan khusus
- d. Diharapkan dinas sosial kota pekanbaru mampu melakukan pembinaan kepada anak-anak yang telah di tertibkan secara merata.
- e. diharapkan juga pembinaan yang di lakukan tidak hanya kepada anak-anak saja tapi kepada orang tua yang bersangkutan. Melalui kerja sama dari pemerintah satu dan yang lainnya, kerja sama dengan masyarakat, lembaga suadaya masyarakat serta aparaturnya yang bersangkutan tentang pembinaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan terjemahan

Dr. Taufiqurrahman. 2014. *Kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta pusat, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas moestopo bragma (pers)

Edi Suharto. Ph. D. 2012. *Analisis kebijakan publik. Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung, ALFABETA CV

Fitriah, mustiqowati Ummul, 2017 *studi implementasi kebijakan kota layak anak (KLA) di kota pekanbaru jurnal ilmiah ilmu administrasi*. Vol. 9 No 2 hal 160-161

<http://abudzar.com/keutamaan-anak-anak-shalih-detail-Gooo7.html>

<https://icc-jakarta.com/2018/07/25/anak-anugerah-sekaligus-amanah-allah-swt/>

Maisurri, Safrina. 2016. *Penegakan hukum terhadap tindakan pidana preadaran obat impor yang tidak memiliki izin edar oleh penyidik*. Rajawali negri sipil. Balai hekir pengawasan obat dan makanan di kota pekanbaru. Vol. 3. No 2. Halaman 4

Marianai. 2017. *Imlementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anakk-anak pengemis di kecamatan mandau)*. Vol. 14. No 2. Halaman 5-6

Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia No.12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak

Prof, Dr. Yulianto Kadji. M.Si. 2016. *Formulasi dan implementasi kebijakan publik, kepemimpinan dan prilaku birokrasi dalam ralita*. Gorontalo. UNG Press Gorontalo

Soekanto. Sajono,. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali pers: jakarta

Peraturan Menteri Nomor. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layanan

Peraturan Menteri Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan

Peraturan Menteri Nomor. 14 Tahun 2011 tetang Panduan Evaluasi Kabupaten atau Kota Layanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

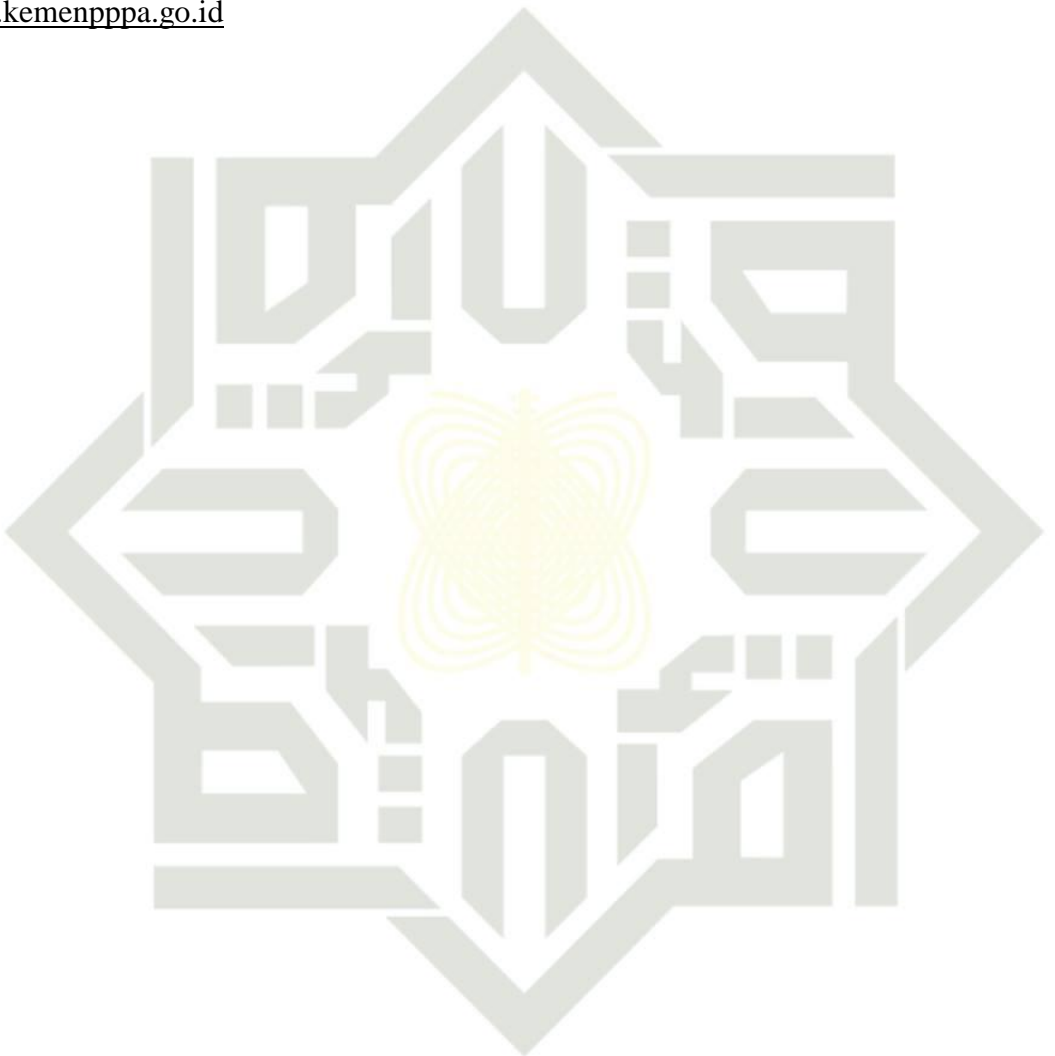
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak

Undang-undang. No 11 Tahun 2012. Tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-undang. No 39 Tahun 1999. Tentang hak asasi manusia

Website: www.kemenpppa.go.id



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak indra S.Sos. MM Kasi Perlindungan Khusus Terhadap Anak



Kordinator unit layana asmanidar S.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hj. Irin Irsanti, S.Pi Kasi Rehsos Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/151/2020 Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
Sifat : Biasa 14 Jumadil Awwal 1441 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

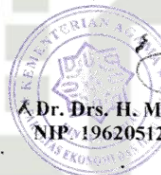
Kepada
Yth. **Abdiana Iiosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Agus Riadi
NIM : 11675102134
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster Perlindungan Khusus"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/152/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
14 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Agus Riadi
NIM. : 11675102134
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru pada Klaster
Perlindungan Khusus" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKANBARU
 Jalan Dagang No. 78 Kp. Tengah Telp. (0761) 8400350 Fax. (0761) 8400351
PEKANBARU 28122

SURAT PERNYATAAN
 NOMOR : 800/DPP-PA-SEKRE/435/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ZUBIR, S.Ag, MH
 NIP : 197002281998031002
 Pangkat/Gol : Pembina Utama TK.I / IV b
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : AGUSRIADI
 NIM : 11675102134
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Universitas : UNIVERSITAS RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhitung tanggal 13 Maret 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRORGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperunya.

a.nKepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



H. ZUBIR, S.Ag, MH
 NIP. 19700228 199803 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 UIN SUSKA RIAU.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS SOSIAL**

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 460 /DINSOS-REHSOS.1/ 675 / 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

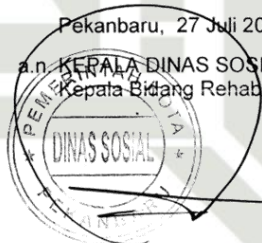
Nama : **AGUSRIANDI**
 NIM : 11675102134
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : SARJANA (S1)
 Alamat : DESA DAYANG SURI KEC. BUNGA RAYA-SIAK
 Lokasi Penelitian : 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU
 2. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASSTER PERLINDUNGAN KHUSUS."**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2020

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Drs. BUSTAMI, MM

Nip. 19630813 198410 1 001

Tembusan

- Yth: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau
 2. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AGUS RIADI
 NIM/SMT : 11675102139
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK.
 DI KOTA PEKANBARU PADA KLASER
 PERLINDUNGAN KHUSUS

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Faraf Pembimbing
		Draft Pertanyaan wawancara.	ch
		Pedoman wawancara.	ch
		Ace Pedoman wawancara.	ch
		Bab 1 ketentuan umum.	ch
		Perbaikan bab 4 dan pembahasan.	ch
		Perbaikan bab 5 dan kesimpulan Saran.	ch
		Perbaikan bab 5 dan 6.	ch
2	Ace untuk Ujian Munqasah 20 Juli 2020	Ace Ujian Munqasah	ch

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan KAJUR untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru, 20, Juli 2020
 Pembimbing I



(Abdiana Hosi, SAp, MPA)
 NIP/NIK 198707162015032003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/31880 tanggal 10 Maret 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | AGUSRIADI |
| 2. NIM | 11675102134 |
| 3. Fakultas | EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | S1 |
| 6. Alamat | DESA DAYANG SURI KEC. BUNGA RAYA-SIAK |
| 7. Judul Penelitian | IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS |
| 8. Lokasi Penelitian | 1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU
2. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Penelitian ini dibuat. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Pekanbaru
 Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



RONI MAHENDRA, S.ST

Penata Tingkat I

NIP. 197 50315 199803 1 005

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Tel. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31880
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/152/2020 Tanggal 10 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : AGUSRIADI |
| 2. NIM / KTP | : 11675102134 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DINAS SOSIAL, BARESKRIM KOTA PEKANBARU, KEJAKSAAN TINGGI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Bareskrim Kota Pekanbaru di Pekanbaru
4. Kepala Kejaksaan Tinggi di Pekanbaru
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Agus Riadi lahir di Topang 24 Agustus 1996. Merupakan anak terahir dari 6 (Enam) bersaudara merupakan anak dari Alm Bapak Saifuddin dan ibuk Masirah Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 003 Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan tamat pada tahun 2009. Lalu Dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Syarif Hidayatullah Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Merati dan tamat pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2016.

Pada tahun 2017/2018 penulis mulai bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai anggota bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia pada tahun 2018/2019 penulis menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2019/2020 penulis menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2019 penulis mengikuti kegiatan peran Sumatra di Universitas Riau yang di ikuti oleh seluruh Universitas Sesumatra dan pada tahun yang sama Penulis mengikuti kegiatan Temu Administrasi di Universitas Sebelas Maret di Solo yang di ikuti oleh Universitas SeIndonesia. 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan judul Skripsi “Implementasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Pada Klaster Perlindungan Khusus”, dan dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.